

LKIP 2021

Laporan Kinerja
Instansi
Pemerintah

Badan Pendapatan Daerah
Kota Bekasi



@bapenda_kotabekasi bapenda



@bapendabekasikt



bapenda.bekasikota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas rahmat dan karunia- Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Tahun 2021 atau periode ketiga dari tahun perencanaan jangka menengah RPJMD Kota Bekasi tahun 2018 – 2023 dan Renstra Bapenda Kota Bekasi tahun 2018 – 2023 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada Bapenda Kota Bekasi untuk pencapaian visi dan misi yang menjadi tanggung jawab Bapenda Kota Bekasi dapat diselesaikan dengan baik meskipun masih dalam masa Pandemic Covid-19.

Dokumen LKIP Bapenda Kota Bekasi Tahun 2021 dimaksudkan untuk :

- A. Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku;
- B. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan responsif;
- C. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut kinerja instansi pemerintah;
- D. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Bapenda selama Tahun Anggaran 2021 Laporan ini untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Kepala Bapenda Kota Bekasi kepada semua pihak yang berkepentingan dan juga laporan ini dimaksudkan untuk sebagai sarana mengevaluasi diri terhadap capaian kinerja secara berkelanjutan dalam rangka mengambil kebijakan dan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk menyusun LKIP ini, kami sampaikan ucapan terima kasih. Kami mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan peningkatan kinerja serta perbaikan bagi penyusunan LKIP Bapenda Kota Bekasi pada tahun berikutnya.

Bekasi,

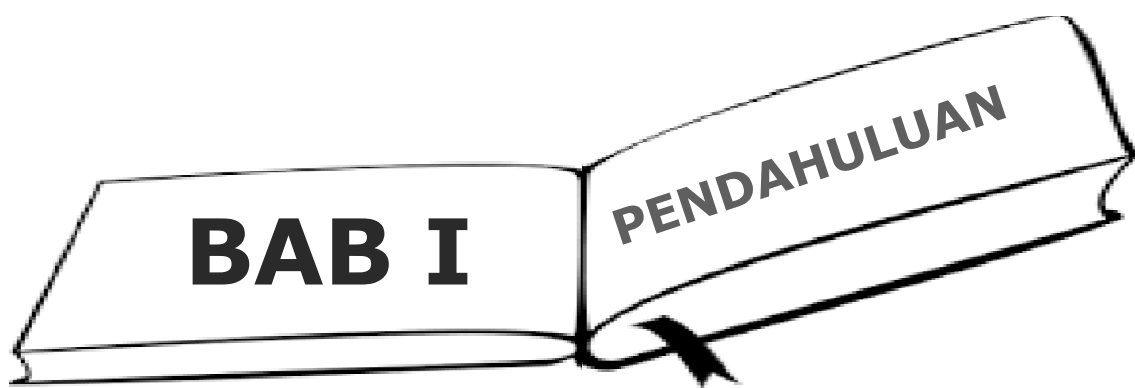
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BEKASI



Drs. H. AAN SUHANDA, S.H., M.Si., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620112 198603 1 019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi	6
1.3 Aspek Strategis Organisasi	10
1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	12
1.5 Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Rencana Strategis 2018 - 2023	19
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Bapenda Kota Bekasi	21
2.1.2 Indikator Kinerja Utama	22
2.2 Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	32
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	33
3.3. Anggaran.....	59
BAB IV PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Rencana	65



1.1 Latar Belakang

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Serangkaian peraturan yang mendasari penyusunan SAKIP yakni Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut-Undang ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/Kota, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Penjelasan Pasal 69 Ayat (2) “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah” dalam ketentuan ini adalah laporan kinerja setiap satuan kerja Perangkat Daerah

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya serta menjelaskan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dalam Bab 1, Pasal (1) tentang Ketentuan Umum nomor 11 yakni Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 diatur bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja (LKIP) berdasarkan perjanjian kinerja dan menyampaikan kepada Walikota paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjelaskan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Gambar 1.1
Hubungan Dokumen Perencanaan Dengan LKIP



Bapenda Kota Bekasi selaku Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi berperan sebagai Urusan Penunjang Pemerintahan dengan bidang urusannya adalah Keuangan Daerah khususnya tentang uang yang didapat yakni Pendapatan Daerah. Untuk itu dalam mendukung visi Pemerintah Kota Bekasi yakni ***Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan***, yang kemudian didukung dengan 5 (lima) misi, Bapenda masuk dalam mendukung misi pertama yakni ***Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik***, sebagaimana yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bekasi 2018 – 2023 serta Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kota Bekasi 2018 – 2023.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bapenda Kota Bekasi adalah sebagai sarana bagi Bapenda Kota Bekasi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Wali Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Bapenda Kota Bekasi. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Bapenda Kota Bekasi untuk dapat melaksanakan

tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh Kota Bekasi;

2. Menjadikan Bapendae Kota Bekasi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Bapenda Kota Bekasi guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Bapenda Kota Bekasi dan Kota Bekasi terhadap penyelenggara Bapenda Kota Bekasi Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP Bapenda Kota Bekasi Tahun 2021 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023. IKU Bapenda Kota Bekasi berkaitan langsung dengan Misi yang ada di RPJMD Kota Bekasi maupun Sasaran yang ada pada Renstra Bapenda Kota Bekasi Tahun 2018-2023

Jika melihat capaian indikator kinerja utama Bapenda Kota Bekasi pada Tahun 2021 yakni untuk **pencapaian Persentase Peningkatan Penerimaan PAD** memperoleh capaian sebesar **153.15 persen** dan **Indikator Nilai IKM** memperoleh capaian kinerja sebesar **103.86 persen**, serta **Meningkatnya Nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi** memperoleh capaian kinerja sebesar **100 persen**, kinerja pada Tahun 2021 Bapenda Kota Bekasi bisa dibilang sangat baik hal ini dikarenakan pencapaian kinerja dapat memenuhi

target yang telah ditetapkan dalam Renstra pada Tahun 2021. Adapun Capaian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. untuk indikator persentase capaian persentase peningkatan penerimaan PAD memperoleh capaian kinerja sebesar 153.15% persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 25.90 persen, capaian ini adalah hasil dari perhitungan dengan target yang telah ditetapkan Tahun 2021 adalah sebesar 16.91 persen. Tantangan yang harus dihadapi oleh Bapenda Kota Bekasi untuk indikator Persentase Peningkatan PAD adalah memastikan bahwa di Tahun 2021 Peningkatan PAD harus dapat mencapai target yang telah ditetapkan untuk mengejar ketertinggalan terhadap capaian tahun 2020 yang tidak dapat mencapai target.
2. Untuk indikator Nilai IKM pada Tahun 2021 memperoleh capaian kinerja sebesar 103.86 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 78.93 capaian ini adalah hasil dari perhitungan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 76. Tantangan yang harus dihadapi oleh Bapenda Kota Bekasi untuk indikator Nilai IKM adalah memastikan bahwa di Tahun 2021 nilai IKM di Bapenda Kota Bekasi minimal dapat mempertahankan capaian realisasi pada tahun 2020.
3. Untuk indikator Meningkatnya Nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi memperoleh capaian kinerja sebesar 100% capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi mencapai penilaian dengan predikat BB capaian ini adalah hasil dari perhitungan dengan target yang telah ditetapkan yakni nilai dengan predikat BB. Tantangan yang harus dihadapi oleh Bapenda Kota Bekasi untuk indikator Meningkatnya Nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi adalah memastikan bahwa di Tahun 2021 nilai AKIP di Bapenda Kota Bekasi dapat ditingkatkan predikat nilainya menjadi nilai A.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Bapenda Kota Bekasi pada Tahun 2021 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB III

(AKUNTABILITAS KINERJA) pada Laporan Kinerja Bapenda Kota Bekasi Tahun 2021.

1.2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Bapenda Kota Bekasi selaku Perangkat Daerah dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah termasuk Badan type A pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi, merupakan sebagai unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan daerah sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

Bapenda mempunyai tugas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pelayanan, pelaporan dan sistem, pendapatan daerah serta pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala Bapenda dibantu oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Selain itu kepala Bapenda juga dibantu oleh empat kepala bidang, yaitu

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perencanaan pendapatan daerah, pengembangan pajak dan retribusi daerah serta regulasi pajak dan retribusi daerah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

2. Pelayanan, Pelaporan dan Sistem

Yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pelayanan administrasi pajak dan retribusi daerah, pelaporan dan pembukuan serta sistem dan informasi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

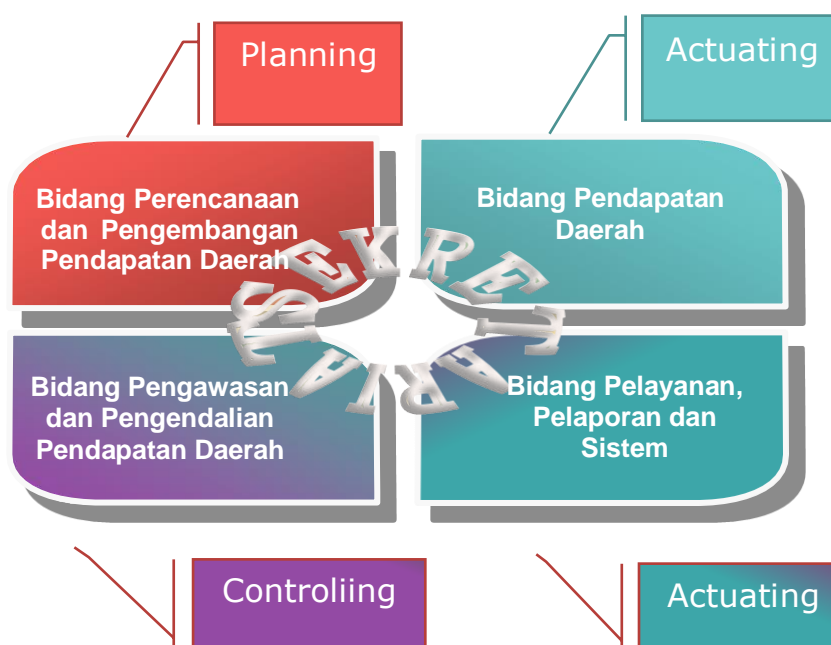
3. Bidang Pendapatan Daerah,

Yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pendaftaran dan penetapan pajak daerah, pendataan dan penilaian pajak daerah serta retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

4. Pengawasan Dan Pengendalian Pendapatan Daerah

Yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pemeriksaan pajak dan retribusi daerah, pengawasan pajak dan retribusi daerah serta penagihan pajak dan retribusi daerah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Gambar 1.2
Skema Design
Kelembagaan Bapenda
Kota Bekasi.



Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

1. Kepala Badan, membawahkan:
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. Sub Bidang Kebijakan Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah.
4. Bidang Administrasi, Konsultasi dan Informasi, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pelayanan Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. Sub Bidang Pelaporan dan Pembukuan;
 - c. Sub Bidang Sistem dan Data.

5. Bidang Pendapatan Daerah, Membawahkan:
- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah;

b. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah;

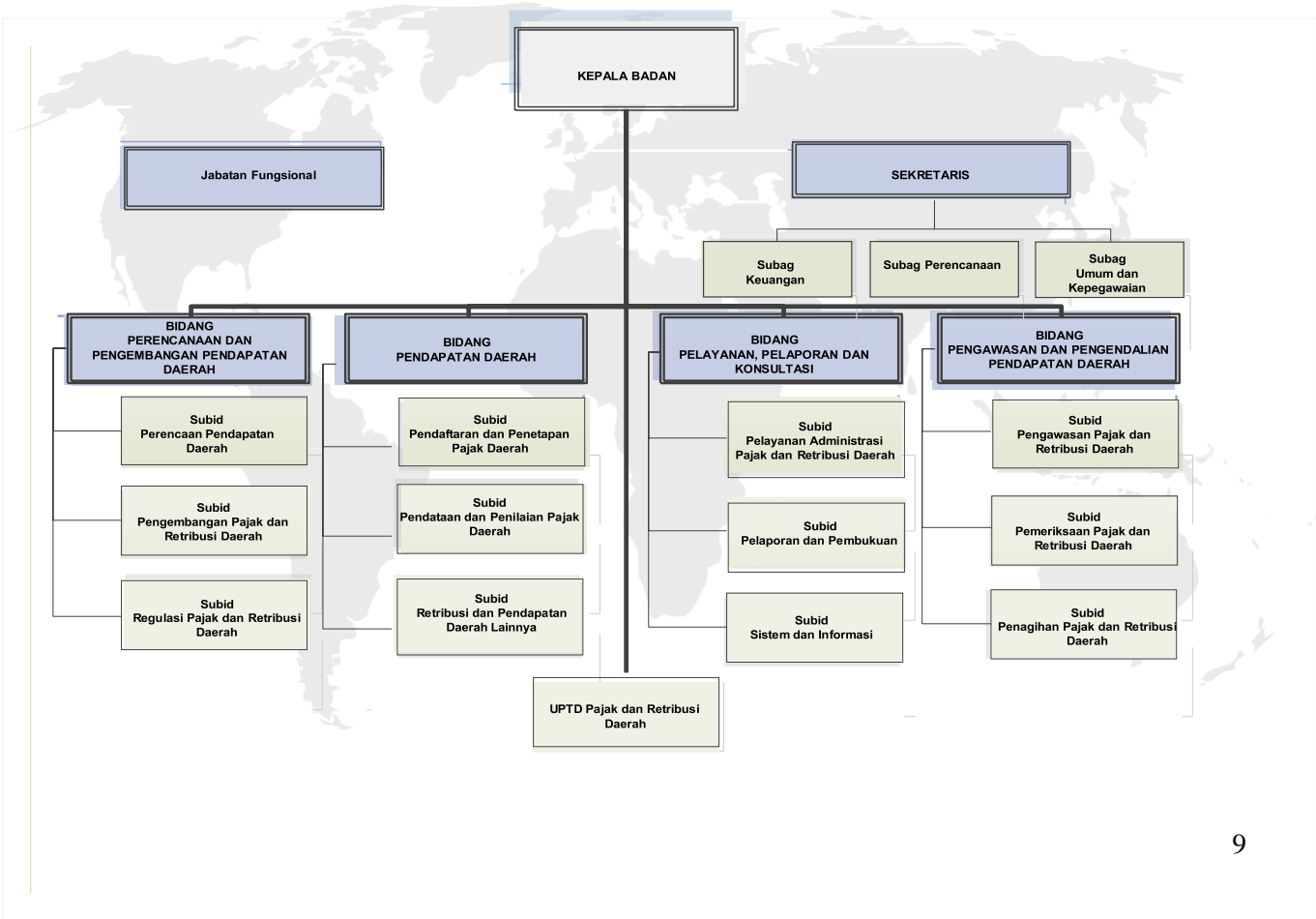
c. Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.
6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah, membawahkan:
- a. Sub Bidang Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah;

b. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah;

c. Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah.
7. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah

Terdiri 12 UPTD Pajak dan Retribusi Daerah di seluruh wilayah Kecamatan se Kota Bekasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 06 Tahun 21 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Gambar 1.3
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPENDA



1.3. Aspek Organisasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Nomor 35 dikatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin. (Fauzi, A. dan Iskandar, E. 1995. Cara Membaca APBD . Malang: Brawijaya University Press).

Word Bank berpendapat bahwa batas 20 % perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Jika kurang dari angka tersebut, maka daerah yang bersangkutan akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri (Glynn Cochrane. *Policies for Strengthening Local Government in Developing Countries. World Bank Staff Working Paper No. 582. Management and Developing Series No. 9. Washington DC : The World Bank, 1983).*

Gambar 1.4

Strategisnya PAD



PAD adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin. (Fauzi, A. dan Iskandar, E. 1995. Cara Membaca APBD . Malang: Brawijaya University Press).



World Bank berpendapat bahwa batas20 % perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Jika kurang dari angka tersebut, maka daerah yang bersangkutan akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yangmandiri (Glynn Cochrane. *Policies for Strengthening Local Government in Developing Countries. World Bank Staff Working Paper No. 582. Management and Developing Series No. 9. Washington DC : The World Bank, 1983).*

Berdasarkan keterangan di atas posisi strategis Bapenda Kota Bekasi sebagai pengelola Pendapatan Asli Daerah jelas sangat strategis, karena kemampuan pendanaan pembangunan sebagai wujud dari kemandirian daerah ada di besaran penerimaan PAD secara keseluruhan dari Pendapatan Daerah.

Suatu tantangan besar harus dihadapi oleh Bapenda Kota Bekasi untuk dapat mewujudkan peningkatan penerimaan PAD sebagai ujung tombak dalam merealisasikan pembangunan di Kota Bekasi. Dengan sebaran potensi PAD di Kota Bekasi yang memiliki luas wilayah sekitar 210,49 kilometer persegi, dengan batas wilayah sebagai berikut sebelah Utara : Kabupaten Bekasi, sebelah Timur : Kabupaten Bekasi, sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok, sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta, dan jumlah penduduk sebesar \pm 2.468.448 Jiwa, yang terdiri dari Pria sebanyak 1.238.339 jiwa dan wanita sebanyak 1.230.109. hal ini merupakan suatu peluang sekaligus hambatan yang harus dapat diselesaikan oleh Bapenda.

Tingginya belanja pemerintah yang diperuntukan membiayai pembangunan diberbagai bidang dan sektor, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari PAD dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat.

Visi Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan perlu dukungan dana pembangunan daerah yang bersumber dari PAD, untuk itu peran Bapenda Kota Bekasi dalam mewujudkan visi Kota Bekasi melalui Optimalisasi Penerimaan PAD sangatlah vital agar dapat terwujudnya visi Kota Bekasi yang mana perlu adanya dukungan Sumber Daya Aparatur serta Perlengkapan dalam menjalankan organisasi.

1.4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Komposisi belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung maupun tidak langsung dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang didanai dari Belanja Langsung terdiri dari 2 (dua) Program dan 7 (tujuh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan Utama pada Bapenda Kota Bekasi adalah melaksanakan Optimalisasi Penerimaan PAD dan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah kepada masyarakat Kota Bekasi. Dalam pelaksanaan tersebut mengalami refocusing anggaran dikarenakan adanya pandemic covid-19 sehingga perlu ekstra kerja dengan dukungan anggaran melalui program dan kegiatan serta didukung oleh aparatur dan perlengkapan yang dilaksanakan oleh Bapenda pada saat awal tahun sebelum refocusing antara lain :

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dan juga pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD pada Revisi RPJMD Pemerintah Kota Bekasi, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi melaksanakan program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut:

1.4.1. Kegiatan

1.4.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Memiliki kontribusi terhadap indikator kinerja RPJMD yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dengan kegiatan dan Sub Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Fungsi
- 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

4. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
- 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.4.1.2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Memiliki kontribusi terhadap indikator kinerja RPJMD yaitu Persentase peningkatan PAD dengan kegiatan:

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- 2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- 5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- 6) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- 7) Penetapan Wajib Pajak Daerah
- 8) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- 9) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- 10) Penagihan Pajak Daerah
- 11) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- 12) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Untuk melaksanakan program dan kegiatan/sub kegiatan yang menjadi kewenangannya sebagai unsur pendukung unsur pemerintahan, pada Tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 155.647.392.652 (seratus lima puluh lima miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), yang dialokasikan kedalam 2 Program, 7 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan.

Namun demikian dikarenakan pandemic Covid-19 masih berlangsung dan dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar ([PSBB](#)) yang kemudian berganti nama dengan Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat ([PPKM](#)), mengakibatkan pergerakan masyarakat beserta seluruh aktifitas dan tatanan kehidupan menjadi terbatas dan berubah. Perubahan ini mengakibatkan menurunnya kegiatan ekonomi yang menjadikan melemahnya daya beli masyarakat. Melemahnya kegiatan ekonomi dan daya beli masyarakat pada akhirnya berimbas pula terhadap tidak tercapainya target pendapatan Pemerintah yang pada gilirannya menyebabkan Pemerintah harus menggeser (refocusing) dan merelokasi alokasi belanja pemerintah yang lebih banyak dialokasikan untuk penanganan Covid-19 dan penyelamatan ekonomi.

Tidak terkecuali dengan anggaran di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi mengalami perubahan anggaran pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 bertambah menjadi Rp 158,194,631,137,- (seratus lima puluh delapan miliar seratus Sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) penambahan tersebut dikarenakan pada APBD murni inputan nilai insentif Pajak Daerah mengalami kenaikan dikarenakan adanya perubahan target penerimaan Pajak Daerah sehingga pada APBD Perubahan ada penambahan nilai pagu untuk insentif (kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN) pendapatan asli daerah, namun demikian untuk program dan kegiatan lainnya mengalami penurunan. Selengkapnnya pagu anggaran dan target kinerja output sebelum dan sesudah perubahan APBD 2021 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi adalah sebagaimana tercantum pada table sebagai berikut:

1.4.2. Layanan Bapenda Kota Bekasi

Sebagai Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dan Bidang Urusannya adalah tentang Keuangan Daerah khususnya tentang Pendapatan Daerah Kota Bekasi, Bapenda Kota Bekasi dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya berdasarkan pendekatan fungsi menghasilkan produk layanan

seperti:

1. Tersusunnya target pendapatan daerah;
2. Tersusunnya regulasi Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Tersosialisasikannya Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Tersedianya Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(NPWP/DRD);
5. Tersedianya Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(SKPD/SKRD);
6. Tersedianya data dan Penilaian tentang Pajak Daerah;
7. Tersedianya layanan langsung ke masyarakat sebanyak 20 jenis pelayananPBB dan BPHTB;
8. Tersedianya pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
9. Tersedianya Sistem pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
10. Tersedianya data hasil pengawasan terhadap wajib pajak dan wajib retribusidaerah;
11. Tersedianya data hasil Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap WP/WR yang tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku;
12. Tersedianya data hasil penagihan terhadap WP/WR dan penguranganpiutang Pajak dan Retribusi Daerah.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKIP Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Kontrak Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Mengukur Capaian Kinerja Organisasi, Capaian Indikator Kinerja Utama serta Realisasi Anggaran

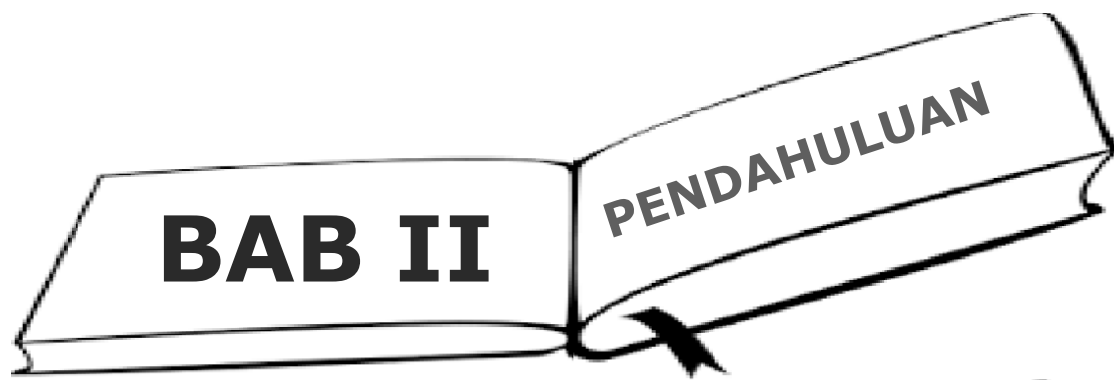
Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.
- 8) Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



2.1. Rentra Bapenda Kota Bekasi

Perencanaan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting dimana di dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi. Perencanaan adalah tahap awal dalam kegiatan suatu organisasi terkait dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Menurut Erly Suandy (2001:2), pengertian perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik-taktik, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan (Permendagri 86 Tahun 2017 pada Bab 1 Ketentuan Umum, Nomor 57).

Kinerja (performance) pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Kinerja karyawan yang umum untuk kebanyakan pekerjaan meliputi beberapa unsur sebagai berikut (Mathis dan Jackson, 2006, 378):

1. Kuantitas dari hasil;
2. Kualitas dari hasil;
3. Ketepatan waktu dari hasil;
4. Kehadiran;
5. Kemampuan untuk bekerjasama.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. (Permendagri 86 Tahun 2017 pada Bab 1 Ketentuan Umum, Nomor 22).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. (Permendagri 86 Tahun 2017 pada Bab 1 Ketentuan Umum, Nomor 26).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2018-2023 memberi mandat bahwa arah kebijakan peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk didalamnya Bapenda Kota Bekasi. Selanjutnya dalam tahapan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung pembangunan di Kota Bekasi.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam visi Kota Bekasi dirumuskan 5 misi Kota Bekasi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Bapenda Kota Bekasi yaitu “Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik”. Berdasarkan RPJMD tersebut

Bapenda Kota Bekasi menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023.

Bapenda Kota Bekasi selaku Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah khususnya dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, agar dapat membiayai pembangunan di Kota Bekasi. Untuk itu Bapenda dalam perencanaan kinerjanya mengkhususkan pada upaya-upaya Peningkatan Penerimaan PAD dan Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Bapenda Kota Bekasi

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. (Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 13 ayat (1)).

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 yang sudah melalui proses Verifikasi dari Bappeda Kota Bekasi memuat tujuan dan sasaran Bapenda Kota Bekasi beserta indikator. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran Bapenda Kota Bekasi yaitu :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada TahunKe -				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah		Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	21.53	11.67	16.91	10	10.01
		Meningkatnya Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	21.53	11.67	16.91	10	10.01
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	77	77.25	76	77.75	79.25
2	Meningkatnya Nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi		Nilai AKIP	B	BB	BB	A	A
		Nilai Akip Pada Bapenda Kota Bekasi	Nilai AKIP	B	BB	BB	A	A

2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

2. Dalam mengukur peningkatan kinerja di Bapenda Kota Bekasi Peningkatan Penerimaan PAD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Sedangkan untuk mengukur peningkatan layanan kepada masyarakat digunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik.

Indikator Kinerja Utama Bapenda Kota Bekasi ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR SASARAN (IKU)	ALASAN	RUMUS					SATUAN	TARGET TAHUN 2021																											
1	Meningkatnya Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	Kwewenangan dan urusan yang menjadi tanggungjawab Bapenda Kota Bekasi sesuai Peraturan yang berlaku	$\frac{\text{Penerimaan PAD Tahun n} - \text{Penerimaan PAD Tahun n-1}}{\text{Penerimaan PAD Tahun n-1}} \times 100\%$					%	16.91																											
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	<div>Untuk mengetahui nilai indexs : $(a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11)+ (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (hx 0,11)+ (i \times 0,11)$ = Nilai Indeks (X) Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x NilaiDasar X x 25 = y</div> <table><tr><th rowspan="2">NIL AI PER SEP SI</th><th rowspan="2">NILAI INTERVAL (NI)</th><th rowspan="2">NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th><th>MUTU PELAY ANAN</th><th>KINE RJA UNIT PELAY ANAN</th></tr><tr><th>(x)</th><th>(y)</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00 - 2,5996</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,5324 - 4,00</td><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr></table>					NIL AI PER SEP SI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAY ANAN	KINE RJA UNIT PELAY ANAN	(x)	(y)	1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik	Indeks (Nilai)	76
NIL AI PER SEP SI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAY ANAN	KINE RJA UNIT PELAY ANAN																																	
			(x)	(y)																																	
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik																																	
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik																																	
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																																	
4	3,5324 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik																																	
3	Meningkatnya Nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi	Nilai Akip Pada Bapenda Kota Bekasi	Amanat RPJMD untuk seluruh OPD	<div>Skor</div> <div>> 85-100</div> <div>> 80-90</div> <div>> 70-80</div> <div>> 60-70</div> <div>> 50-60</div> <div>> 30-50</div> <div>> 0-30</div>			<div>Nilai</div> <div>AA</div> <div>A</div> <div>BB</div> <div>B</div> <div>CC</div> <div>C</div> <div>D</div>		Nilai	BB																											

2.2. Perjanjian Kinerja

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah

pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Bapenda Kota Bekasi Tahun 2020 merupakan target kinerja tahun kedua dari Renstra Bapenda Kota Bekasi 2018-2023, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Bapenda Kota Bekasi. Selanjutnya target kinerja tersebut dijabarkan dalam target per triwulan sebagai bahan evaluasi per triwulan. Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam Perjanjian Kinerja (Tabel 2.3) beserta Program dan Kegiatan setelah Refocusing (Tabel 2.4) :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Tahun Anggaran 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Triwulan	Target
			Satuan	Tahunan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Meningkatnya Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	%	16.91	Triwulan I	2.54%
					Triwulan II	5.07%
					Triwulan III	7.76%
					Triwulan IV	2.54%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Nilai	77.25	Triwulan I	-
					Triwulan II	76
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	76
3	Meningkatnya Nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi	Nilai Akip Pada Bapenda Kota Bekasi	Nilai	BB	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	BB
					Triwulan IV	-

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Setelah
Refocusing Tahun 2021

NO	BAGIAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		JUMLAH (Rp)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			151,764,534,602	153,909,942,987
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			74,820,000	-
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	74,820,000	-
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			108,093,349,000	112,054,193,434
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2400 orang/bulan	2400 orang/bulan	108,046,149,000	112,054,193,434
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2400 orang/bulan	1 Dokumen	47,200,000	-
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			650,000,000	225,000,000
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	420 Stel	0 Stel	500,000,000	-
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Orang	10 Orang	150,000,000	75,000,000
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	-	61 Orang	-	150,000,000
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4,991,984,000	3,653,331,174
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	985.00 unit	985.00 unit	50,000,000	50,000,000
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.00 unit	45.00 unit	299,992,250	332,523,424
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4908.00 Unit	4908.00 Unit	999,999,000	999,999,000
		3940.00 pack	3940.00 pack		

NO	BAGIAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		JUMLAH (Rp)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	104.469 unit	35184.00 Unit	2,520,000,000	1,520,000,000
		663250 lembar	662966 lembar		
		50.00 Unit	50.00 Unit		
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	7900.00 Eksemplar	7900.00 Eksemplar	85,000,000	85,000,000
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	391 kali	500 kali	836,993,000	465,809,000
13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1650 box	1650 box	199,999,750	199,999,750
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			35,504,381,602	35,707,797,602
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		255 Dokumen	9,000,000	4,000,000
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1596.00 Rek/Bulan	1596.00 Rek/Bulan	1,123,200,000	1,123,200,000
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.00 Orang	24.00 Orang	34,372,181,602	34,580,597,602
		2592.00 Orang/Bulan	2592.00 Orang/Bulan		
		84.00 Orang/Bulan	84.00 Orang/Bulan		
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,450,000,000	2,269,620,777
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119 Unit	32.00 Unit	750,000,000	569,620,777
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	602.00 Unit	602.00 Unit	450,000,000	450,000,000
19	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3184.00 M2	3184.00 M2	1,250,000,000	1,250,000,000
B	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			3,882,858,050	4,284,688,150
I	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			3,882,858,050	4,284,688,150
	Indikator Program : Persentase Peningkatan PAD Terhadap Pendapatan Daerah			1,025,379,900	619,575,000

NO	BAGIAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		JUMLAH (Rp)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	338,162,500	22,875,000
		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen		
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	2 Jenis	2 Data Potensi	388,867,400	596,700,000
		1 Perwal	0 Perwal		
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Event	0 Event	298,350,000	-
	Indikator Program : Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah			974,500,000	907,415,000
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	200,000,000	200,000,000
		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen		
5	Penetapan Wajib Pajak Daerah	700000.00 SPPT	700000.00 SPPT	500,000,000	500,000,000
6	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000
7	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		4.00 Laporan	174,500,000	107,415,000
		1 Unit	1 Unit		
		12 bulan	12 bulan		
		140 orang	0 orang		
	Indikator Program : Persentase Peningkatan Kepatuhan Pajak Daerah			203,600,000	728,320,000
8	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	50 LHP	50 LHP	156,000,000	631,000,000
		3 Laporan	3 Laporan		
		-	1 Aplikasi		
		-	1 Laporan		
9	Penagihan Pajak Daerah	12 Kecamatan	12 Kecamatan	47,600,000	97,320,000
		-	146 Wajib Pajak		
	Indikator Program : Nilai IKM			1,679,378,150	2,029,378,150
10	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		5.00 Aplikasi	1,159,999,900	1,509,999,900
			12.00 Bulan		
			13.00 Unit		
			320.00 Buku		
11	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Kali	2 Kali	120,000,000	120,000,000

NO	BAGIAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		JUMLAH (Rp)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
12	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	17 Unit	520.00 Unit	399,378,250	399,378,250
		2 Unit			
		1 Unit			
		500 Buah			
Jumlah				155,647,392,652	158,194,631,137



Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Bapenda Kota Bekasi atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Bapenda Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2021.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data capaian kinerja dari setiap indikator. Pengumpulan data capaian kinerja dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Nomor 06398.2/Kep.4711.A-Bapenda/XII/2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP), tanggal 19 Desember 2018.

Adapun komponen data dan rumus perhitungan capaian kinerja pada Bapenda Kota Bekasi adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Inventarisir Komponen Data dan Rumus Perhitungan
Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		INDIKATOR	KOMPONEN DATA	RUMUS PERHITUNGAN
Tujuan	:	Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	Data Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Desember 2020 dan data Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Terupdate sampai dengan saat ini
				$\frac{\text{Penerimaan Pendapatan Tahun N} - \text{Penerimaan Pendapatan Tahun N-1}}{\text{Penerimaan Pendapatan Tahun N-1}} \times 100$
Sasaran	:	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	Data Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Desember 2020 dan data Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Terupdate sampai dengan saat ini
				$\frac{\text{Penerimaan Pendapatan Tahun N} - \text{Penerimaan Pendapatan Tahun N-1}}{\text{Penerimaan Pendapatan Tahun N-1}} \times 100$
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	Nilai Survey IKM pada Bapenda Kota Bekasi
Program	:	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Data Wajib Pajak dari sembilan jenis pajak
				$\frac{\text{Data WP Tahun N} - \text{Data WP Tahun N-1}}{\text{Data WP Tahun N-1}} \times 100$
			Persentase Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah	Data Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Sekarang
				$\frac{\text{Penerimaan PAD}}{\text{Penerimaan Pendapatan Daerah} - \text{Penerimaan DAK}} \times 100$
			Persentase Meningkatnya Kepatuhan WP	Data Wajib Pajak yang diperiksa, diawasi dan di Tagih
				$\frac{\text{Data WP (Data WP PBB - BPHTB - WP PJU)} - \text{WP Tidak Patuh (WP Diperiksa, WP Diawasi, WP Ditagih)}}{\text{Data WP (Data WP PBB - BPHTB - WP PJU)}} \times 100$
			Nilai IKM	Nilai Survey IKM pada Bapenda Kota Bekasi
				Hasil Penilaian Survey dari pihak Independent
Tujuan	:	Meningkatkan Nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi	Nilai AKIP Pada Bapenda Kota Bekasi	Data Kinerja Komponen AKIP pada Bapenda Kota Bekasi
				Nilai SAKIP pada Bapenda Kota Bekasi dari Inspektorat
Sasaran	:	Meningkatnya Nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi	Nilai AKIP Pada Bapenda Kota Bekasi	Data Kinerja Komponen AKIP pada Bapenda Kota Bekasi
				Nilai SAKIP pada Bapenda Kota Bekasi dari Inspektorat
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen perencanaan
			2 Optimalisasi Disiplin Aparatur	Jumlah data pegawai
			3 Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pegawai Non ASN
			4 Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aset Milik Bapenda

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja yang telah dicapai Bapenda Kota Bekasi selama tahun 2021, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Bapenda Kota Bekasi tahun 2018-2023 serta perjanjian kinerja Bapenda Kota Bekasi tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja.

Adapun target dan realisasi pencapaian sasaran strategis tahun 2021 adalahsebagaimana table di bawah ini:

Tabel. 3.2
Target dan Realisasi
Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	%	16.91	25.90	153.15%
2		Nilai IKM	Nilai IKM	76	78.93	103.86%
3	Meningkatnya Nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi	Nilai AKIP Pada Bapenda Kota Bekasi	Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB	BB	100% (capaian tahun 2020) untuk tahun 2021 penilaian belum dilaksanakan

Pengukuran kinerja terhadap Sasaran Straegis yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Bapenda Kota Bekasi tahun 2018-2023. Melihat tabel di atas secara keseluruhan target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi pada tahun 2021 sangat baik dalam pencapaiannya Untuk mencapai sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan Nilai AKIP pada Bapenda

Kota Bekasi dan indikatornya Nilai AKIP Pada Bapenda Kota Bekasi dengan capaian kinerja 100 persen (tercapai).

3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

3.2.1. Sasaran strategis Pertama

Sasaran Pertama : Meningkatnya Penerimaan PAD
 Indikator Sasaran : Persentase Peningkatan Penerimaan PAD

Pada perencanaan capaian strategis pertama yakni Meningkatnya Penerimaan PAD dengan target tahun 2021 adalah sebesar 16.91% yang berdasarkan pada peningkatan PAD dari tahun 2020. Nilai capaian strategis pertama diukur dari realisasi penerimaan PAD dikurangi realisasi penerimaan tahun 2020 dibagi realisasi penerimaan PAD tahun 2020 dikali 100.

$$\frac{(\text{Realisasi PAD Tahun N} - \text{Realisasi PAD Tahun N-1})}{\text{Realisasi PAD Tahun N-1}} \times 100$$

Tabel 3.3
Aalisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Penerimaan PAD

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
		TARGET	REALISASI	
1	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	16.91	25.90	153.15%

Pencapaian realisasi penerimaan PAD meskipun masih dalam dimasa pandemic covid-19 dapat terpenuhi bahkan melebihi target dari yang ditetapkan hal ini menggambarkan bahwasanya kondisi recovery di Kota Bekasi menuju arah yang membaik.

Banyak sektor usaha yang sudah mulai membuka dan melakukan aktifitasnya, hal ini tentunya mendukung peningkatan

penerimaan PAD dari sektor Pajak Daerah dan pendapatan asli daerah lainnya sebagaimana data pendukung di bawah ini :

3.2.1.1. Analisis Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3.4
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021

PENDAPATAN DAERAH	TARGET	REALISASI	+/- (%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.492.954.556.479	2.582.074.286.434	3,57%
Pajak Daerah	1.841.686.983.386	1.715.963.810.423	-6,83%
Retribusi Daerah	94.602.066.427	66.781.742.362	-29,41%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.162.087.452	14.261.745.049	8,35%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	543.503.419.214	785.066.988.600	44,45%

Sumber Data : Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Subid Pelapooran dan Pembukuan

Realisasi dari target tahun 2021 melebihi target sebesar 3.57% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.492.954.556.479 dan terealisasi sebesar Rp. 2.582.074.286.434 sehingga terjadi kelebihan capaian sebesar Rp. 89.119.729.955 atau 3.57%.

a. Pajak Daerah

Tabel 3.5
Realisasi Pajak Daerah

PENDAPATAN ASLI DAERAH	TARGET	REALISASI	+/- (%)
PAJAK DAERAH	1.841.686.983.386	1.715.963.810.423	-6,83%
Pajak Hotel	23.319.694.170	28.823.157.731	23,60%
Pajak Restoran	309.868.620.782	268.410.623.997	-13,38%
Pajak Hiburan	19.274.874.718	14.826.539.910	-23,08%
Pajak Reklame	63.271.044.786	66.492.734.480	5,09%
Pajak Penerangan Jalan	340.817.145.399	355.244.474.867	4,23%
Pajak Parkir	32.661.995.441	27.165.924.689	-16,83%

PENDAPATAN ASLI DAERAH	TARGET	REALISASI	+/_ (%)
Pajak Air Bawah Tanah	5.365.064.369	5.473.755.681	2,03%
Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)	579.533.417.588	448.920.284.130	-22,54%
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	467.575.126.133	500.606.314.938	7,06%

Sumber Data : Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Subid Pelapooran dan Pembukuan

Permasalahan dan Upaya dalam pencapaian target

1. Pajak Hotel

Meskipun aktivitas dimasa pandemic covid 19 sudah menuju membaik akan tetapi belum 100% pulih kembali seperti dimasa normal, hal ini tentunya mempengaruhi kunjungan hotel di Kota Bekasi. Untuk itu perlu inovasi dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak hotel melalui relaksasi penhapusan denda administrasi pajak daerah, peningkatan pengawasan dan pengendalian pajak daerah, penagihan piutang pajak daerah serta menyesuaikan target pajak daerah sesuai kondisi pada masa pandemic. Realisasi penerimaan pajak hotel sampai dengan Desember 2021 mencapai peningkatan 23.60% dari target yang telah ditetapkan.

2. Pajak Restoran

Sektor pajak restoran salah satu primadona pemasukan pajak daerah di Kota Bekasi hal ini dikarenakan Kota Bekasi sebagai kota penyanggah ibu kota negara merupakan tempat pilihan untuk permukinan sehingga usaha rumah makan menjadi pilihan yang bagus. Dimasa recovery ini sektor restoran perlahan bangkit menuju normal di Kota Bekasi karena pembatasan waktu dan kerumunan orang banyak masih diberlakukan. Untuk itu perlu inovasi dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak restoran melalui relaksasi penhapusan denda administrasi pajak daerah, peningkatan pengawasan dan pengendalian pajak daerah,

penagihan piutang pajak daerah serta menyesuaikan target pajak daerah sesuai kondisi pada masa pandemic. Realisasi penerimaan pajak restoran sampai dengan Desember 2021 masih belum mencapai target kurang dari -13.38% dari target yang telah ditetapkan.

3. Pajak Hiburan

Untuk Sektor pajak hiburan masih sulit menuju normal hal ini dikarenakan meskipun dimasa recovery pembatasan jam malam masih diberlakukan untuk menghindari dampak negative yang diakibatkan. Untuk itu perlu inovasi dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak hiburan melalui relaksasi penghapusan denda administrasi pajak daerah, peningkatan pengawasan dan pengendalian pajak daerah, penagihan piutang pajak daerah serta menyesuaikan target pajak daerah sesuai kondisi pada masa pandemic. Realisasi penerimaan pajak hiburan sampai dengan Desember 2021 tidak mencapai target -23.08% dari target yang telah ditetapkan.

4. Pajak Reklame

Sektor pajak reklame juga mengalami kondisi perbaikan yang signifikan dimasa recovery, keterbatasan aktifitas masyarakat banyak usaha yang memanfaatkan iklan reklame melalui fasilitas belanja online dan lain sebagainya. Realisasi penerimaan pajak reklame sampai dengan Desember 2021 mencapai peningkatan 5.84.% dari target yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah melalui relaksasi penghapusan denda administrasi pajak daerah, peningkatan pengawasan dan pengendalian pajak daerah, penagihan piutang pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah serta menyesuaikan target pajak daerah sesuai kondisi pada masa pandemic.

5. Pajak Penerangan Jalan

Sektor pajak penerangan jalan databasenya berdasarkan jumlah gardu yang otoritasnya berbeda beda kewilayahannya, di Kota

Bekasi ada gardu yang dibawah otoritas PLN DKI Jakarta, Gardu Kabupaten Bekasi, Gardu Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2021 mencapai target bahkan melebihi sebesar 4.23% dari target yang ditetapkan. Upaya yang dilakukan adalah melakukan peningkatan fungsi koordinasi dengan OPD Pengelola yakni DBMSDA dan juga koordinasi dengan pihak PLN.

6. Pajak Parkir

Realisasi pajak parkir pada tahun 2021 tidak memenuhi target kurang capaiannya sebesar. -16.83%, hal ini dikarenakan tempat-tempat keramaian seperti mall masih dibatasi jumlah pengunjungnya dan juga pembatasan jam operasional. melalui relaksasi penghapusan denda administrasi pajak daerah, peningkatan pengawasan dan pengendalian pajak daerah, penagihan piutang pajak daerah, Pemeriksaan pajak daerah serta menyesuaikan target pajak daerah sesuai kondisi pada masa pandemic.

7. Pajak Air Tanah

Realisasi pajak air tanah pada tahun 2021 capaiannya melebihi target sebesar. 2.03%, hal ini dikarenakan banyak wajib pajak air tanah yang belum memiliki izin sementara wewenang izin keluarnya dari pihak provinsi sehingga terkendala dalam pemungutannya. Upaya yang dilakukan adalah menghimbau pembuatan izin dan meningkatkan peran koordinasi dengan pihak Provinsi.

8. PBB

Realisasi penerimaan PBB pada tahun 2021 masih belum mencapai target dari yang telah ditetapkan dengan nilai kekurangan capaian sebesar -22.54%, permasalahan PBB adalah masih tingginya nilai piutang PBB, upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan PBB adalah melaksanakan penagihan piutang pajak daerah, melaksanakan operasi sisir ke wilayah, membuat kebijakan relaksasi pajak dengan penghapusan denda

dan discount dari nilai Pokok PBB.

9. BPHTB

Realisasi penerimaan BPHTB pada tahun 2021 memenuhi target bahkan melampaui target sebesar 7.06%, permasalahan BPHTB dikarenakan nilai transaksi jual beli tidak sesuai dengan harga pasar, upaya yang dilakukan adalah melaksanakan verifikasi lapangan atas transaksi jual beli untuk meningkatkan penerimaan BPHTB.

b. *Retribusi Daerah*

Tabel 3.6
Realisasi Retribusi Daerah

PENDAPATAN ASLI DAERAH	TARGET	REALISASI	+/_ (%)
RETRIBUSI DAERAH	75.832.587.342	66.781.742.362	-11,94%
Retribusi Jasa Umum	35.460.169.327	37.274.774.125	5,12%
Retribusi Jasa Usaha	8.083439.346	6.715.180.570	-16.93%
Retribusi Perizinan Tertentu	51.058.457.754	22.791.787.667	-55.36%

Sumber Data : Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Subid Pelapooran dan Pembukuan

Permasalahan dan Upaya Pencapaian Target

1. Retribusi Jasa Umum

Realisasi retribusi jasa umum mencapai target bahkan melebihi target dengan nilai sebesar 5.12%. permasalahan pada retribusi jasa umum adalah pelayanan kemasyarakat belum optimal. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan fungsi koordinasi dengan OPD Penghasil serta melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan restribusi di wilayah

2. Retribusi Jasa Usaha

Pembatasan aktifitas masyarakat dimasa pandemic mempengaruhi terhadap kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan sarana olah raga, penempatan sewa panggung reklame dititik tertentu, dan berkurangnya penerimaan dari retribusi terminal. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan dari

retribusi jasa usaha tidak mencapai target masih kurang sebesar -16.93%. upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor retribusi jasa usaha adalah meningkatkan fungsi koordinasi dengan OPD Penghasil serta melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan retribusi di wilayah

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum sepenuhnya pulih dimasa menuju normal dari wabah pandemic covid 19 dan adanya kebijakan pembatasan waktu aktifitas serta pembatasan keramaian mempengaruhi penerimaan terhadap retribusi IMB dan Retribusi Izin Trayek. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan retribusi perzinan tertentu tidak mencapai target masih kurang sebesar 55.36% dari target yang harus dicapai. upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor retribusi Perizinan tertentu adalah meningkatkan fungsi koordinasi dengan OPD Penghasil serta melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan retribusi di wilayah

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Tabel 3.7
Realisasi Hasil
Pengelolaan Kekayaan
Yang Dipisahkan

PENDAPATAN ASLI DAERAH	TARGET	REALISASI	+/_ (%)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13,162,087,452	14.261.745.049	8.35%
Bagian Laba dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot	1,289,560,371	1.440.925.548	11.74%
Bagian Laba dari Perusahaan Daerah Air Minum Kab & Kota Bekasi	4,389,445,155	3.910.535.087	-10.91%
Bagian Laba dari BPR Syariah	1,500,000,000	2.927.202.488	95.15%
Bagian Laba dari PT Bank BJB	5,983,081,926	5.983.081.926	0.00%

Sumber Data : Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Subid Pelapooran dan Pembukuan

Keberhasilan Pencapaian Target

Penerimaan pendapatan dari bagi hasil laba usaha daerah melebihi target sebesar 8.35%, hal ini karena:

- 1. Kontribusi terbesar dari sektor ini adalah Bagian Laba dari PT Bank BJB mencapai target 100%;
- 2. Bagian laba dari BPR Syariah melebihi target sebesar 92.15% dan Bagian Laba dari Perusahaan Daerah Air Minum melebihi target sebesar 11.74%.

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Tabel 3.8
Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah

PENDAPATAN ASLI DAERAH	TARGET	REALISASI	+/_ (%)
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	543,503,419,214	785.066.988.600	44.45%
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	500,000,000	94.669.000	-81.07%
Penerimaan Jasa Giro	8,091,029,727	12.162.403.514	50.32%
Pendapatan Bunga Deposito	17,238,496,536	20.423.594.164	18.48%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	313.246.203	#DIV/0!
Komisi, Potongan, dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	-	-	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	197.378.737	-
Pendapatan Denda Pajak	6,043,490,991	6.128.407.866	1.41%
Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian	8,234,605,179	39.472.578.345	379.35%
Pendapatan BLUD	497,492,425,496	670.167.060.746	34.71%
Lain - Lain PAD Yang Sah Lainnya	5,903,371,285	36.107.650.025	511.64%

Sumber Data : Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Subid Pelapooran dan Pembukuan

Keberhasilan Pencapaian Target

Ketercapaian penerimaan dari Lain-Lain PAD yang Sah melebihi target sebesar 44.45%, hal ini dipengaruhi oleh:

1. Peningkatan penerimaan dari Jasa Giro dan Bunga Deposito;
2. Penerimaan dari pendapatan dari pengembalian, BLUD dan Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya mengalami kenaikan yang signifikan;

3.2.1.2. Perbandingan Pendapatan Daerah Dengan Nasional dan Kabupaten/Kota Tetangga

a. Perbandingan Dengan Nasional

Pelaksanaan APBN 2021 mencatatkan kinerja positif dan melebihi target dalam APBN 2021. Realisasi pendapatan negara hingga 31 Desember 2021 mampu tumbuh Rp. 2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp. 1.743,6 triliun.

Capaian tersebut tumbuh 21,6 persen lebih tinggi dibandingkan APBN tahun 2020 yang sebesar Rp. 1.647,8 triliun.

Ini adalah suatu recovery dan rebound yang sangat kuat. Meskipun di tahun 2021 masih ada pandemi yang memukul dengan Delta dan Omicron, namun kita masih bisa tumbuh di 21,6 (persen).

Menkeu memaparkan realisasi sementara penerimaan pajak telah mencapai Rp. 1.277,5 triliun atau 103,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp. 1.229,6 triliun. Capaian ini tumbuh 19,2 persen dari penerimaan pajak tahun 2020 lalu yang sebesar Rp. 1.072,1 triliun akibat terpukul pandemi Covid-19. Jadi (penerimaan pajak) kita Rp. 47,9 triliun lebih tinggi dari target APBN.

Sementara, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp. 269 triliun atau 125,1 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021 sebesar Rp. 215 triliun.

Tahun lalu, (penerimaan) bea dan cukai mencapai Rp. 213 triliun dan relatif stabil, tapi tetap sedikit kontraktif, terutama untuk bea masuk dan keluarnya. Jadi kalau sekarang tumbuh 26,3 persen, itu adalah suatu recovery yang luar biasa.

Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai Rp. 452 triliun atau 151,6 persen dari target APBN 2021 sebesar Rp. 298,2 triliun. Realisasi ini tumbuh 31,5 persen dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp. 343,8 triliun.

Sementara Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 dari target sebesar Rp. 5.685.691.671.008 triliun dan teralisasi sebesar Rp. 5.727.920.347.533 dengan capaian sebesar 100.74%. realisasi tersebut naik sebesar 17.63% dari realisasi tahun 2020. Kontribusi terbesar dalam penerimaan pendapatan daerah di Kota Bekasi adalah dari Pendapatan Transfer sebesar 52.34%, lalu yang kedua Pendapatan Asli Daerah sebesar 45.08% dan yang terakhir Lain-Lain Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 2.58%. melihat dari angka kontribusi ini Pendapatan Transfer yang mendominasi penerimaan pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran pembangunan daerah pada Pemerintah Kota Bekasi masih perlu dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat sementara sebagaimana pada Bab 2 dijelaskan kedudukan PAD yang sangat strategis. Word Bank mengindikasikan minimal PAD harus mencapai 20% sebagai cerminan jalannya Otonomi Daerah, sedangkan nasional tidak ada penjelasan detail angka persentase PAD yang ideal dalam penerimaannya akan tetapi rasio kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi keuangannya penilaiannya terlihat dari rasio persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah. Artinya, kebutuhan biaya pembangunan untuk percepatan pembangunan tingkat ketergantungannya semakin rendah jidak PAD nya semakin meningkat.

Tabel. 3.9
Perbandingan Realisasi
Penerimaan Negara dengan
Pemerintah Kota Bekasi

NO	REALISASI PENERIMAAN	TAHUN ANGGARAN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pendapatan Nasional	Rp. 1.743 triliun	Rp. 2.003 triliun	114.88%
2	Pendapatan Daerah Kota Bekasi	Rp. 5.6 triliun	Rp. 5.7 triliun	100.74%

sumber data okezone.com, Selasa, 7 Januari 2020 dan Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Berdasarkan table di atas rasio target antara nasional dan Pemerintah Kota Bekasi adalah 0.32% dan rasio realisasi sebesar 0.28%. pendapatan Daerah di Kota Bekasi dibawah 1% dari Pendapatan Negara.

b. Perbandingan Dengan Kabupaten/Kota Tetangga

Tabel. 3.10

Realisasi Perbandingan PAD dengan Kab/Kota Tetangga

NO	REALISASI PENERIMAAN	TAHUN ANGGARAN 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pendapatan Asli Kabupaten Bekasi*	2.53 T	2.54	100.55%
2	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor**	3.3 T	3.7 T	112.67 %
3	Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor***	914 M	930 M	102 %
4	Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi	2.4 T	2.5 T	103.57%

*Bapenda Kabupaten Kota Bekasi(9 Januari)

**antaranews.com (4 Januari 2022)

***bogor-kita.com (27 Desember 2021)

Realisasi penerimaan pendapatan daerah secara resmi angka penerimaannya adalah hasik audited dari BPK, meskipun angka yang disajikan masih belum resmi masih angka sementara dari hasil pengolahan sub bidang pembukuan dan pelaporan dapat kita tarik sajikan keterangan berdasarkan table di atas hasil data yang kami dapat maka dapat ditarik perbandingan sebagai berikut:

1. Realisasi capaian Kabupaten Bekasi mencapai 100.55%, jika

- dibandingkan dengan Kota Bekasi realisasi penerimaan PAD dengan Kabupaten Bekasi sebanding.
2. Nilai Nominal baik target maupun realisasi Kota Bekasi terhadap Kabupaten Bogor masih tertinggal. Kota Bekasi hanya mencapai 72.73% persen dari target di Kabupaten Bogor dan realisasinya mencapai 67.57 % dari realisasi Kabupaten Bogor.
 3. Kota Bogor capaian PADnya masih dibawah Kota Bekasi jika dibandingkan dengan Kota Bekasi maka hanya sebesar 36.56% dari realisasi PAD yang dicapai Kota Bekasi.

c. Perbandingan Kinerja Dengan Tahun Lalu

Tabel. 3.11

**Perbandingan Realisasi Kinerja dan capaian kinerja Sasaran
Strategis Tahun 2021 Dengan Tahun Sebelumnya Untuk
Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Penerimaan
PAD**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	
			2020	2021
1	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	Persen	-16.34%	25.90%

Dari table di atas dapat dijelaskan kenaikan PAD berdasarkan komponennya secara rinci, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi PAD Dengan Tahun Lalu

PENDAPATAN ASLI DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	BERTAMBAH/ BERKURANG	+/_ (%)
PAJAK DAERAH	1.558.385.667.948	1.715.963.810.423	157.578.142.475	10,11%
Pajak Hotel	24.405.729.520	28.823.157.731	4.417.428.211	18,10%
Pajak Restoran	227.434.213.890	268.410.623.997	40.976.410.107	18,02%
Pajak Hiburan	24.232.677.384	14.826.539.910	- 9.406.137.474	-38,82%
Pajak Reklame	62.826.268.284	66.492.734.480	3.666.466.196	5,84%
Pajak Penerangan Jalan	352.436.804.465	355.244.474.867	2.807.670.402	0,80%
Pajak Parkir	28.494.034.548	27.165.924.689	- 1.328.109.859	-4,66%
Pajak Air Tanah	5.273.474.560	5.473.755.681	200.281.121	3,80%

PENDAPATAN ASLI DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	BERTAMBAH/ BERKURANG	+/_ (%)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	435.999.742.361	448.920.284.130	12.920.541.769	2,96%
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	397.282.722.936	500.606.314.938	103.323.592.002	26,01%
RETRIBUSI DAERAH	75.832.587.342	66.781.742.362	9.050.844.980	-11,94%
Retribusi Jasa Umum	35.335.648.214	37.274.774.125	1.939.125.911	5,49%
Retribusi Jasa Usaha	6.641.730.670	6.715.180.570	73.449.900	1,11%
Retribusi Perizinan Tertentu	33.855.208.458	22.791.787.667	11.063.420.791	-32,68%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.949.321.848	14.261.745.049	2.312.423.201	19,35%
Bagian Laba dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot	1.400.072.612	1.440.925.548	40.852.936	2,92%
Bagian Laba dari Perusahaan Daerah Air Minum Kab & Kota Bekasi	1.857.176.335	3.910.535.087	2.053.358.752	110,56%
Bagian Laba dari BPR Syariah	2.816.478.972	2.927.202.488	110.723.516	3,93%
Bagian Laba dari PT Bank BJB	5.875.593.929	5.983.081.926	107.487.997	1,83%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	404.768.021.159	785.066.988.600	380.298.967.441	93,95%
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	4.402.576.889	94.669.000	4.307.907.889	-97,85%
Penerimaan Jasa Giro	6.840.620.912	12.162.403.514	5.321.782.602	77,80%
Pendapatan Bunga Deposito	39.954.923.522	20.423.594.164	19.531.329.358	-48,88%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	91.948.582	313.246.203	221.297.621	240,68%
Komisi, Potongan, dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	-	-	-	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	134.807.210	197.378.737	62.571.527	46,42%
Pendapatan Denda Pajak	2.759.903.956	6.128.407.866	3.368.503.910	122,05%
Pendapatan Denda Retribusi	121.006.180	-	121.006.180	100,00%
Pendapatan dari Pengembalian	11.737.196.721	39.472.578.345	27.735.381.624	236,30%
Pendapatan BLUD	318.405.360.302	670.167.060.746	351.761.700.444	110,48%
Lain - Lain PAD Yang Sah Lainnya	20.319.676.885	36.107.650.025	15.787.973.140	77,70%
JUMLAH	2.050.935.598.297	2.582.074.286.434	531.138.688.137	25,90%

Sumber Data : Hasil Rekonsiliasi Realisasi SIMDA, SIMPATDA dan Sismiop yang dituangkan dalam bentuk Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan

Permasalahan dan Rekomendasi

1. Permasalahan Capaian Strategis Pertama

- 1) PAD menjadi tumpuan kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
- 2) Penerimaan PAD setiap tahunnya harus meningkat.
- 3) Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dipengaruhi dengan peningkatan kualitas pembangunan daerah.
- 4) Kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi dipengaruhi dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
- 5) Peningkatan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dipengaruhi oleh peningkatan profesionalisme pengelolaan BUMD.
- 6) Peningkatan penerimaan Lain-Lain PAD yang sah dipengaruhi dengan peningkatan peran fungsi kewenangan perangkat daerah dalam pengelolaan urusan di perangkat daerah.
- 7) Peningkatan PAD secara keseluruhan didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung sumber daya sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta sumber daya anggaran yang memadai.
- 8) Stabilitas politik dan ekonomi dapat terjaga.

2. Upaya dan Rekomendasi

1) Upaya

Dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD khususnya dari sektor Pajak Daerah, Bapenda Kota Bekasi berupaya mengintervensi pajak daerah melalui :

a. Intervensi Pajak Daerah melalui Regulasi

Yakni Inovasi kebijakan Bapenda Kota Bekasi untuk mengamankan penerimaan pajak daerah dengan kebijakan yang menyesuaikan harmonisasi terhadap keadaan masyarakat. Kebijakan menerbitkan insentif fiskal kepada pelaku usaha dalam bentuk pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan pokok pajak, atau sanksinya. Insentif fiskal yang diberikan atas dasar diskresi Kepala Daerah dengan melihat situasi terkini terkait pandemic covid-19 sehingga diharapkan dapat tetap

mempertahankan capaian pajak daerah dengan optimal dan dengan tujuan agar pembiayaan pembangunan daerah tetap stabil.

b. Meningkatkan Fungsi Koordinasi Dengan Instansi Vertikal

Melaksanakan Perjanjian kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Penyelenggaraan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bekasi serta kerjasama penagihan pajak daerah.

c. Intervensi Pajak Daerah melalui verifikasi dan validasi data.

Yakni upaya Bapenda untuk mengetahui transaksi jual beli tanah dan bangunan sehingga dapat menentukan besaran BPHTB yang harus dibayarkan, petugas Bapenda melakukan penelitian kantor dengan mengecek harga pasaran di WEB dan kelapangan meneliti kebenaran harga jual.

d. Intervensi Pajak Daerah melalui Penagihan Piutang Pajak Daerah

Melakukan penagihan piutang pajak daerah terhadap mata pajak yang terdapat piutang pajak.

e. Membangun sistem data base pajak dan retribusi daerah yang terintegrasi

f. Memelihara basis data serta meningkatkan peran data pajak daerah.

g. Intervensi Pajak Daerah melalui Pemasangan Alat Transaksi Real Time (Tapping Box)

Bapenda Kota Bekasi melakukan pemasangan alat terhadap wajib pajak, pemasangan alat tapping box terhadap wajib pajak Hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak Parkir untuk mengetahui potensi pajak real time di lapangan.

b. Intervensi Pajak Daerah melalui Pemeriksaan Pajak Daerah

Bapenda Kota Bekasi melaksanakan pemeriksaan pajak daerah terhadap wajib pajak yang terindikasi tidak patuh.

2) **Rekomendasi**

- Melanjutkan kebijakan relaksasi karena dampak dari pandemi covid masih terasa pada pelaku usaha;
- Meningkatkan Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- Meningkatkan Fungsi Penagihan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Membuat Inovasi terkait peningkatan penerimaan Pajak Daerah;
- Mengintegrasikan Sistem Pajak Daerah dengan OPD penghasil

d. Dukungan Program dan Kegiatan

Pencapaian indikator Persentase Peningkatan Penerimaan PAD tahun 2021 ini didukung oleh indikator capaian Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan dukungan indikator program sebagai berikut:

Tabel 3.13
Realisasi Indikator Program Capaian Sasaran Strategis Pertama Tahun 2021

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	%	0.80	2.86	357.50%
2	Persentase Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	48.67	47.57	97.74%
3	Persentase kepatuhan Wajib pajak	%	97.67	97.74	100.07%

Penjelasan pencapaian kinerja sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk

mengungkit pencapaian sasaran strategis.

Pada pelaksanaan program belanja langsung urusan Bapenda Kota Bekasi hanya mempunyai satu program yakni Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan sasaran programnya adalah **“Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah”**, adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapenda adalah kegiatan yang berdasarkan fungsi pada masing- masing bidang sehingga indikator program sesuai dengan fungsi pada bidang-bidang di lingkungan Bapenda Kota Bekasi.

Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sasaran Program : Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator Program :

1. Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah.

Rumusan Perhitungan :

$$\frac{\text{Data Potensi Pajak dan Retribusi Tahun } n - \text{Data Potensi Pajak dan retribusi Tahun } n-1}{\text{Data Potensi Pajak dan Retribusi Tahun } n-1} \times 100$$

Berdasarkan rumusan perhitungan di atas dan data yang kami peroleh pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.14
Rekapitulasi Data Wajib Pajak Daerah

NO	PAJAK	WAJIB PAJAK	
		2020	2021
1	Hotel	103	115
2	Restoran	2.440	2.752
3	Hiburan	398	400
4	Reklame	5.201	2.014
5	Penerangan Jalan	63	63
6	Parkir	302	311
7	Air Tanah	439	449
8	PBB	675.774	694.570
9	BPHTB	22.099	26.368
JUMLAH		706.819	722.803
PROSENTASE KENAIKAN (Data WP Tahun 2019 = 698.645)		1,17%	2,86%

(sumber data dari SIMPATDA dan Sistem PBB serta BPHTB)

Terlihat pada tabel di atas bahwasanya terjadi kenaikan Data potensi wajib pajak dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebanyak

20.223 sehingga terjadi peningkatan sebesar 2.26% dari data di atas terlihat bahwasanya terjadi perubahan signifikan yakni

1. Pajak Reklame pada tahun 2020 sebesar 5.201 WP dan pada tahun 2021 sebanyak 2.014 WP hal ini dikarenakan perhitungan di tahun 2020 berdasarkan pada titik reklame yang dipasang sementara pada tahun 2021 adalah jumlah WP yang mengajukan pemasangan.
2. Di tahun 2020 WP PBB sebanyak 675.774 WP meningkat pada tahun 2021 menjadi 694.570, hal ini dikarenakan banyaknya permohonan pengajuan Pemecahan NOP sehingga bertambahnya NOP baru.
3. Pada tahun 2020 jumlah WP yang mengajukan permohonan validasi SSPD BPHTB sebanyak 22.099 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 20.223. hal ini dikarenakan banyak terjadi transaksi jual beli property di wilayah Kota Bekasi.

Dari target yang ditetapkan sebesar 0.80% terealisasi sebesar 2.86% maka nilai capaian kinerjanya adalah sebesar 357.50%, hal ini menunjukkan meskipun dimasa pandemic covid banyaknya sektor usaha yang tidak melakukan aktifitasnya namun tidak mengajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD) sementara banyak usaha baru yang bermunculan sehingga menambah NPWPD di Kota Bekasi

2. Persentase Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Rumusan Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Penerimaan PAD Tahun } n - \text{Jumlah Penerimaan PAD Tahun } n-1}{\text{Jumlah Penerimaan PAD Tahun } n-1} \times 100$$

Catatan : Perhitungan ini tidak memproyeksikan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada RPJMD sehingga pada proses perhitungannya tidak menghitung DAK.

Tabel. 3.15
Realisasi Pendapatan Daerah

PENERIMAAN PAD DAN PENDAPATAN DAERAH	REALISASI PENDAPATAN DAERAH	
	2020	2021
PAD	2.050.935.598.297	2.582.074.286.434
PENDAPATAN DAERAH	4.869.352.900.452	5.727.920.347.533
DAK	313.421.032.687	299.546.939.783
Jumlah Penerimaan Pendapatan Daerah dikurangi penerimaan DAK	4.555.931.867.765	5.428.373.407.750
RASIO	45,02%	47,57%

Terlihat pada tabel di atas penerimaan PAD Tahun 2021 sebesar 2.582.074.286.434 dan penerimaan pendapatan daerah sebesar 5.727.920.347.533 dikurangi penerimaan DAK sebesar 299.546.939.783 sehingga menjadi 5.428.373.407.750 maka berdasarkan perhitungan rumus nilai capaian untuk indicator program ini adalah sebesar 47.57%

3. Persentase kepatuhan Wajib pajak.

Rumusan Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah WP} - \text{WP Tidak patuh}}{\text{Jumlah WP}} \times 100\%$$

WP yang dihitung adalah wajib pajak selain PBB, BPHTB dan PPJU

Tabel. 3.16
PERSENTASE KEPATUHAN WAJIB PAJAK

KEPATUHAN WP	WAJIB PAJAK	
	2020	2021
Jumlah WP Tidak Patuh (yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan aktif)	250	139
Jumlah WP Keseluruhan	706.819	727.042
Jumlah WP PBB, BPHTB dan PPJU	697.936	721.001
Juml WP dikurangi WP PBB, BPHTB dan PPJU	8.883	6.141
HASIL PERHITUNGAN	97,19%	97,74%

pada tahun 2021 jumlah WP keseluruhan dikurangi WP PBB dan WP BPHTB serta WP PPJU adalah sebesar 6.141 WP dan WP

yang diperiksa pada tahun 2021 sebanyak 139 WP sehingga menurut rumus perhitungan mencapai 97.74% (Sumber Data SIMPATDA dan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah);

3.2.2. Sasaran Strategis Kedua

Sasaran Kedua : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator Sasaran : Nilai IKM

Pada perencanaan capaian strategis kedua yakni Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan target tahun 2021 adalah nilai sebesar 76, hasil penilaian ini adalah nilai dari pelaksanaan survey IKM di Bapenda Kota Bekasi.

Rumus Perhitungan:

Untuk mengetahui nilai indeks

$$(a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (h \times 0,11) + (i \times 0,11) = \text{Nilai Indeks (X)}$$

Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar

$$X \times 15 = Y$$

a. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kedua

Tabel 3.17
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Nilai IKM

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
		TARGET	REALISASI	
1	Nilai IKM	76	78.93	103.86%

Dari table di atas dapat disampaikan bahwa pelaksanaan survey IKM pada Bapenda dilakukan pada semester I dan Semester

II, adapun hasil penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Perhitungan Nilai IKM

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	NILAI PERUNSUR
1	Persyaratan	0.11	0.349
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	0.11	0.358
3	Waktu Penyelesaian	0.11	0.347
4	Biaya/Tarif	0.11	0.343
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	0.11	0.352
6	Kompetensi Pelaksana	0.11	0.357
7	Perilaku Pelaksana	0.11	0.368
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.11	0.318
9	Sarana dan Prasarana	0.11	0.366
	jumlah		3.157
	Interprestasi IKM		78.93

Sumber Data : Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Kesimpulan dari table di atas secara keseluruhan nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Bapenda Kota Bekasi pada 2021 adalah 78.93 hal ini dapat diartikan bahwa kinerja pelayanan publik dilingkungan Bapenda Kota Bekasi yang diterima oleh masyarakat adalah BAIK.

Unsur “Perilaku Pelaksana”, “Kompetensi Pelaksana”, dan “Produk Spesifikasi Jenis Layanan” menjadi tiga unsur dengan nilai rata-rata dan persentasi top 2 Box paling tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga unsur tersebut memiliki kinerja yang paling baik dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain. Sedangkan unsur “Sarana dan Prasarana”, “Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan” dan “Waktu Penyelesaian” menjadi tiga unsur dengan kinerja paling tidak baik jika dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain sehingga perlu peningkatan kinerja terhadap unsur tersebut untuk dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Bapenda Kota Bekasi.

b. Perbandingan Kinerja

Capaian nilai kinerja pada Bapenda Kota Bekasi dapat kita lihat peningkatan nilainya dari tahun 2020 ke 2021 melalui perbandingan realisasi di bawah ini.

Tabel 3.19
Perbandingan
Realisasi Nilai IKM
Dengan Tahun Lalu

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	
			2020	2021
2	Nilai IKM	Nilai	77.97	78.93

Sumber Data : Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari table di atas dapat dijelaskan bahwa, pada awal Tahun 2020 terjadi banjir besar yang mencapai kantor Bapenda Kota Bekasi sehingga ruang pelayanan banyak mengalami kerusakan serta adanya pandemic covid-19 hal ini mempengaruhi capaian kinerja pada tahun 2021 namun demikian ada kenaikan pencapaian nilai IKM pada tahun 2020 sebesar 77.97 mengalami peningkatan menjadi sebesar 78.93, hasil rekomendasi hasil survey pada tahun 2021 untuk meningkatkan nilai IKM ditindaklanjuti dengan membuat rencana aksi dan dilaksanakan pada tahun 2022.

Permasalahan dan Rekomendasi

1. Permasalahan Capaian Strategis Kedua

- Unsur Sarana dan Prasarana khususnya di pelayanan pada Bapenda Kota Bekasi memang kurang memadai seperti belum adanya fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas dan ruang menyusui serta tempat anak;
- Unsur Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan, penanganan pengaduan melalui Website dan serta fasilitas lainnya belum mencukupi pada Bapenda Kota Bekasi
- Unsur Waktu Penyelesaian, dalam SOP waktu penyelesaian sudah ditentukan hal dapat diubah dalam mempercepat waktu

penyelesaian.

2. Upaya dan Rekomendasi

1) Upaya

- Membuat Rencana Aksi untuk peningkatan nilai IKM;
- Membangun sarana dan prasarana sesuai rekomendasi;
- Membangun Website dan aplikasi berbasis IT untuk memudahkan penanganan pelayanan;
- Menyusun perubahan SOP untuk peningkatan pelayanan.

2) Rekomendasi

- Melaksanakan Rencana Aksi kaitan peningkatan nilai IKM;
- Mengoptimalkan sarana IT dalam peningkatan pelayanan khususnya penanganan permasalahan yang ada;
- Meningkatkan peran fungsi koordinasi dengan bidang-bidang terkait untuk efektivitas pelaksanaan pelayanan.

c. Dukungan Program dan Kegiatan

Tabel. 3.20

Indikator Program Sasaran Strategis Ke 2

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Nilai IKM	Nilai	76	78.93	103.86

Sumber Data Hasil Laporan Program dan Kegiatan dari Bidang-Bidang yang terinput dalam Simpelbang serta laporan evaluasi internal.

Pada pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian sasaran strategis ke 2 Bapenda Kota Bekasi hanya didukung oleh Program dan sasaran program yang sama dengan sasaran strategis ke 1. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapenda adalah kegiatan yang berdasarkan fungsi, sehingga indikator programnya disesuaikan dengan fungsi pada bidang-bidang di lingkungan Bapenda Kota Bekasi.

Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sasaran Program : Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator Program :

Nilai IKM.

Rumus Perhitungan:

Untuk mengetahui nilai indeks

$$(a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (h \times 0,11) + (I \times 0,11) = \text{Nilai Indeks (X)}$$

Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar

$$X \times 15 = Y$$

Sasaran Strategis kedua dan Indikator Program mempunyai target yang sama dan capaian kinerjanya sebesar 103.86%

3.2.3. Capaian Sasaran Strategis Ketiga

Tabel 3.21
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Nilai AKIP Pada Bapenda Kota Bekasi

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
		TARGET	REALISASI	
1	Nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi	BB	BB	100%

Dari table di atas dapat disampaikan bahwa target kinerja untuk Nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi telah memenuhi target

b. Perbandingan Kinerja

Capaian nilai kinerja pada Bapenda Kota Bekasi dapat kita lihat nilainya dari tahun 2020 ke 2021 melalui perbandingan realisasi di bawah ini.

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi

Dengan Tahun Lalu

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	
			2020	2021
2	Nilai AKIP Pada Bapenda Kota Bekasi	Nilai	BB	BB

Sumber Data : Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari table di atas dapat dijelaskan bahwa, pada Tahun 2020 target nilai BB terpenuhi begitupun dengan target kinerja tahun 2021 mendapat nilai predikat BB dan untuk tahun 2022 target nilai AKIP naik menjadi A.

Permasalahan dan Rekomendasi

1. Permasalahan Capaian Strategis Ketiga

- Dokumen Perencanaan belum menjadi pedoman dalam pelaksanaan kinerja organisasi.
- Pengumpulan dan Pengolahan data mekanisme belum terpola dengan baik.
- Kinerja AKIP beranggapan hanya tanggungjawab kesekretariatan saja belum menjadi tanggungjawab seluruh bidang pada lembaga.

2. Upaya dan Rekomendasi

1) Upaya

- Menyusun dokumen perencanaan serta pendukungnya
- Menyusun SOP Pengumpulan dan Pengolahan Data
- Membuat laporan kinerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku
- Menyusun perubahan SOP untuk peningkatan pelayanan.

2) Rekomendasi

- Mensosialisasi dan asistensi penyusunan indicator kegiatan serta target kinerja di lingkungan Badan;
- Merumuskan mekanisme pengolahan data sesuai kebutuhan;

- Membangun team work di lingkungan Badan;

c. Dukungan Program dan Kegiatan

Tabel. 3.23

Indikator Program Sasaran Strategis Ke 3

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100%
2	Optimalisasi Disiplin Aparatur	%	100	100	100%
3	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100%
4	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100%

Sumber Data Hasil Laporan Program dan Kegiatan dari Bidang-Bidang yang terinput dalam Simpelbang serta laporan evaluasi internal.

Pada pelaksanaan program dam kegiatan pencapaian sasaran strategis ke 3 Bapenda Kota Bekasi hanya didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, program dan kegiatan ini bersifat belanja rutin untuk kebutuhan pelaksanaan kedinasan pada Bapenda Kota Bekasi.

Program :Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Program : Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik

Indikator Program :

1. Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator ini adalah pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dalam hal pengelolaan perencanaan badan dan pengelolaan keuangan untuk kebutuhan pelaksanaan kinerja pada Badan.

2. Optimalisasi Disiplin Aparatur

Indikator ini adalah pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dalam hal pengelolaan Kepegawaian di lingkungan Badan.

3. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator ini adalah pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dalam hal pengelolaan akan kebutuhan administrasi, jasa, ATK, Listrik, Cetakan, Alat kantor, dan sebagainya.

4. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator ini adalah pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana untuk kebutuhan kedinasan.

3.3. Anggaran

3.3.1. Realisasi Anggaran dan Fisik

Tabel
Realisasi Anggaran dan Fisik
Tahun 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			SILPA
			NOMINAL	KEU %	FISIK %	
A	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	153,909,942,987	130,408,037,792	84.73	99.93	23,466,890,195
I	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	100.00	-
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	0	100.00	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	112,054,193,434	94,582,308,151	84.41	100.00	17,471,885,283
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	112,054,193,434	94,582,308,151	84.41	100.00	17,471,885,283
3	Koordinasi dan Penyusunan	-	-	0.00	100.00	-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			SILPA
			NOMINAL	KEU %	FISIK %	
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	225,000,000				
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	-	-	0.00	0.00	-
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Fungsi	75,000,000	43,810,000	58.41	100.00	31,190,000
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	150,000,000	146,175,000	97.45	100.00	3,825,000
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,653,331,174	2,188,747,106	59.91	99.63	1,464,584,068
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50,000,000	50,000,000	100.00	100.00	-
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	332,523,424	279,207,727	83.97	100.00	53,315,697
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	999,999,000	578,881,990	57.89	100.00	421,117,010
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,520,000,000	975,608,000	64.18	100.00	544,392,000
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	85,000,000	82,281,000	96.80	100.00	2,719,000
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	465,809,000	30,384,989	6.52	97.40	435,424,011
13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	199,999,750	192,383,400	96.19	100.00	7,616,350
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35,707,797,602	31.795.817.413	89.04	100.00	3.911.980.189
14	Penyediaan Jasa	4,000,000	224,000	5.60	100.00	3,776,000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			SILPA
			NOMINAL	KEU %	FISIK %	
	Surat Menyurat					
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,123,200,000	530,712,139	47.25	100.00	592,487,861
16	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	34,580,597,602	31,264,881,274	90.41	100.00	3,315,716,328
IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,269,620,777	1,651,180,122	72.75	100.00	618,440,655
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	569,620,777	193,974,122	34.05	100.00	375,646,655
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	450,000,000	365,135,000	81.14	100.00	84,865,000
19	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,250,000,000	1,092,071,000	87.37	100.00	157,929,000
B	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4,284,688,150	3,005,552,116	70.15	95.83	1,279,136,034
IIV	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4,284,688,150	3,005,552,116	70.15	95.83	1,279,136,034
20	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	22,875,000	18,675,000	81.64	100.00	4,200,000
21	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	596,700,000	193,435,000	32.42	50.00	403,265,000
22	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	0.00	100.00	-
23	Penyediaan Sarana dan Prasarana	399,378,250	326,410,000	81.73	100.00	72,968,250

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			SILPA
			NOMINAL	KEU %	FISIK %	
	Pengelolaan Pajak Daerah					
24	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	200,000,000	179,404,800	89.70	100.00	20,595,200
25	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1,509,999,900	1,265,923,516	83.84	100.00	244,076,384
26	Penetapan Wajib Pajak Daerah	500,000,000	479,457,800	95.89	100.00	20,542,200
27	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	120,000,000	119,920,000	99.93	100.00	80,000
28	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100,000,000	93,126,000	93.13	100.00	6,874,000
29	Penagihan Pajak Daerah	97,320,000	86,720,000	89.11	100.00	10,600,000
30	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	631,000,000	141,980,000	22.50	100.00	489,020,000
31	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	107,415,000	100,500,000	93.56	100.00	6,915,000
JUMLAH TOTAL		158,194,631,137	133,413,589,908	84.34	97.88	24,746,026,229

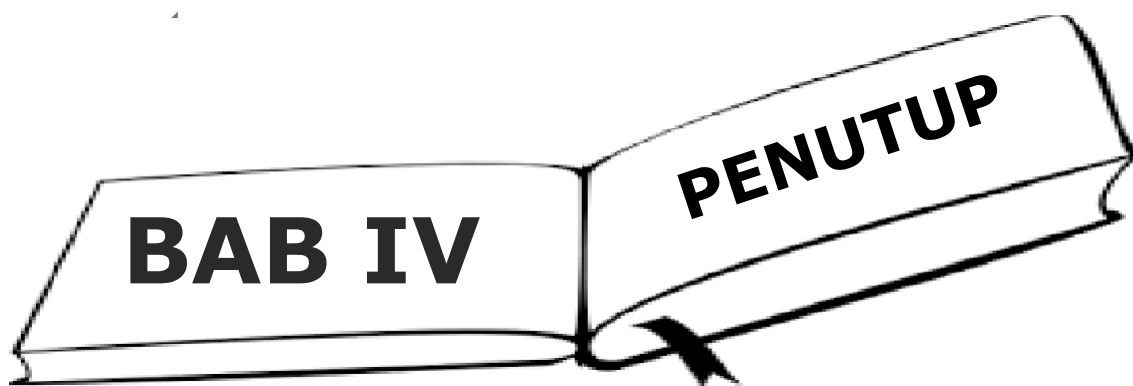
Realisasi Anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp133,413,589,908,- (seratus tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh tiga ribu juta enam ratus empat Sembilan ratus delapan rupiah) atau sebesar 84.34%, sedangkan realisasi fisiknya mencapai 97.88%. Realisasi fisik kegiatan/sub kegiatan tidak mencapai target 100% dikarenakan beberapa kegiatan/ sub kegiatan mengalami refocusing dan relokasi pada APBD Perubahan 2021 karena pandemic Covid-19 masih belum berakhir.

Hambatan Dan Permasalahan

Beberapa hambatan yang sering terjadi adalah :

1. Penyelesaian dokumen anggaran beserta dokumen pendukungnya seringkali tidak tepat waktu, sehingga mengganggu proses pelaksanaan kegiatan;
2. Penyusunan dokumen anggaran yang masih belum baik, sehingga menghambat saat pelaksanaan karena diperlukan revisi dokumen anggaran;
3. Belum seluruh Aparatur Pengelola Kegiatan memahami proses pengadaan barang jasa secara elektronik dan belum memahami kegunaan dan manfaat yang didapatkan dengan menggunakan proses pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara elektronik.

Selain permasalahan tersebut diatas, pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pembangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi berjalan dengan baik, namun demikian beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena mengalami refocussing dan mengalami kendala lainnya. Adapun rincian hambatan/permasalahan yang timbul dapat dilihat pada table berikut:



4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bapenda Kota Bekasi Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bapenda selama tahun anggaran 2021.

Bapenda Kota Bekasi telah berupaya untuk melaksanakan **OPTIMALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH** berdasarkan suatu strategi perencanaan yang sistematis yang dalam hal ini telah dirumuskan berbentuk Rencana Strategis (Renstra) dengan indikator sasarannya adalah Persentase Peningkatan Penerimaan PAD target kinerjanya sebesar 16.91% dan Indek Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah target kinerjanya sebesar 76 nilai IKM dan Nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi mendapat predikat nilai BB, **Capaian kinerja Sasaran Strategis Bapenda Kota Bekasi Tahun 2021 :**

1. Capaian Penerimaan PAD tahun 2021 mencapai melebihi dari target yakni mencapai 25.90%. dalam masa pandemic covid-19 merupakan kinerja yang memuaskan karena mengingat kendala yang berat harus dijalani dalam masa ini, capaian ini merupakan kategori “BAIK”,
2. Nilai IKM, dengan capaian sebesar 103.86%. Dari IKM sebesar 76 terealisasi sebesar 78.93 meskipun dampak kerusakan banjir

pada tahun 2020 masih belum sepenuhnya dapat tertangani kerusakan yang terjadi hal ini dikarenakan prioritas anggaran untuk penanganan kesehatan yang diakibatkan pandemic covid-19 hal ini menjadi tantangan berat yang harus dihadapi, namun demikian capaian dari sasaran ini melebihi target yang dicapai.

3. Nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi, dengan capaian sebesar 100%. Nilai AKIP pada Bapenda Kota Bekasi ditargetkan mendapat predikat nilai BB, untuk tahun 2020 Bapenda mendapat nilai Predikat BB sementara untuk nilai pada Tahun 2021 belum dinilai oleh Inspektorat Kota Bekasi.

4.2. Rencana

Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi selalu berupaya untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga keinginan untuk menciptakan kemandirian keuangan daerah dan pelayanan prima Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 dapat terlaksana.

Strategi yang telah dan terus dijalankan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja, adalah:

1. Membangun basis data tentang pajak dan retribusi daerah
2. Menyusun Metodologi perencanaan pendapatan daerah yang terintegrasi dengan sistem data
3. Menginventarisir kebutuhan regulasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk direview sesuai dengan kondisi saat ini
4. Melaksanakan intervensi pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah
5. Menyusun kebijakan relaksasi pajak dan retribusi daerah;
6. Peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak melalui pemeriksaan, checker dan on the spot;
7. Melakukan penegakan Perda Pajak dan Retribusi Daerah;
8. Membentuk Tim Sinergitas dengan OPD terkait guna

Peningkatan Pendapatan Daerah;

9. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat/Wajib pajak/wajib retribusi daerah;
10. Meningkatkan pelayanan pajak daerah dengan mendekatkan pelayanan di kecamatan-kecamatan dan Mall Pelayanan Publik (Pajak PBB-P2, BPHTB, Reklame dan Retribusi) dan menambah tempat pembayaran pajak dan retribusi daerah;
11. Melaksanakan pelayanan jemput bola pembayaran Pajak PBB-P2;
12. Melaksanakan kegiatan on day service dalam rangka percepatan proses perizinan dan pembayaran;
13. Melakukan review/penyempurnaan regulasi dan SOP pemungutan Pajak dan Retribusi daerah;
14. Melaksanakan pendataan potensi Pajak dan Retribusi Daerah;
15. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemungut pajak dan retribusi daerah;
16. Melaksanakan evaluasi penerimaan PAD secara berjenjang dan berkala.

Untuk program dan kegiatan, Bapenda akan memfokuskan pelaksanaan dimasa yang akan datang terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah agar dapat mewujudkan sasaran strategis pada Bapenda Kota Bekasi guna terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi, diantaranya:

1. Meningkatkan SDM yang berkompeten dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan fungsi Sitem/IT untuk memudahkan pengelolaan, pembayaran dan pelayanan serta pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Mengoptimalkan regulasi, system dan prosedur yang dapat menguatkan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
4. Mengupdate data wajib pajak untuk meningkatkan potensi;
5. Memverifikasi piutang pajak daerah.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga LKIP yang telah dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan guna kegiatan yang akan datang, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah Guna Pembangunan Daerah Kota Bekasi.

Amien.....!